

## **Sosialisasi Persiapan Akreditasi Di PKBM Generus Nusantara Dalam Menentukan Kelayakan**

Ila Rosmilawati<sup>1</sup>, Muhamad Farhan<sup>2</sup>, Larasati<sup>3</sup>,  
Muhammad Gizwa Afdhallah Sachlan<sup>4</sup>, Fisi Dwi Yunika<sup>5</sup>

Program Studi Pendidikan Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa<sup>1</sup>

Program Studi Pendidikan Non Formal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa<sup>2,3,4,5</sup>

Email Korespodensi: [irosmilawati@untirta.ac.id](mailto:irosmilawati@untirta.ac.id)<sup>1</sup>

DOI: <https://doi.org/10.31629/khidmat.v1i1.7004>

### **ABSTRAK**

Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau yang lebih dikenal dengan sebutan PKBM, merupakan satuan pendidikan nonformal yang termasuk dalam Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun. Paket A, Paket B, dan Paket C adalah beberapa program kesetaraan yang ditawarkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, PKBM harus lulus penilaian dari BAN PAUD dan PNF dengan menggunakan instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ini mencakup delapan standar: 1. Standar Kompetensi Lulusan; 2. Standar Isi; 3. Standar Proses; 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5. Standar Sarana dan Prasarana; 6. Standar Pengelolaan; dan 7. Standar Penilaian. Standar Pembiayaan. Jika PKBM telah memiliki akreditasi, maka PKBM tersebut akan diberikan izin untuk menyelenggarakan ujian program pendidikan kesetaraan. Sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal, PKBM Generus Nusantara bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanannya dengan menjadi terakreditasi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses sosialisasi persiapan akreditasi di PKBM Generus Nusantara. Dalam mempersiapkan akreditasi peneliti tertarik untuk mendampingi PKBM Generus Nusantara Kota Serang dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif, teknik pengelolaan data menerapkan observasi, wawancara dan dokumentasi, hasil penelitian membuktikan pada persiapan akreditasi melibatkan semua unsur yang terlibat dalam suatu lembaga, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pengajar, kesesuaian kurikulum, dan dukungan masyarakat setempat merupakan beberapa faktor yang menentukan kelayakan. Proses persiapan akreditasi di PKBM Generus Nusantara berhasil disosialisasikan dengan baik, sehingga meningkatkan kesadaran semua pihak yang terlibat dan mendorong partisipasi mereka untuk memenuhi persyaratan akreditasi. Pengaruh akreditasi memotivasi PKBM untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki dalam satuan PKBM.

**KATA KUNCI:** Akreditasi, PKBM, Pendidikan Non-Formal

## PENDAHULUAN

Ada tiga jenis pendidikan di Indonesia: formal, informal, dan non-formal, menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sedangkan masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan pendidikan formal sedangkan untuk pendidikan informal dan non formal masih sangat asing didengar oleh kalangan masyarakat Indonesia secara namanya. Tetapi UUD RI menetapkan pendidikan non formal ini menjadi salah satu jalur pendidikan di Indonesia yang diperlakukan sama hal layaknya seperti pendidikan formal (Ahmad et al., 2022).

Bidang pendidikan non-formal mencakup sejumlah lembaga dan kegiatan, seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) (Nugroho, 2021; Sukmana et al., 2023). PKBM menjadi bentuk pendidikan diluar pendidikan formal yang memberikan layanan kepada masyarakat, pendidikan non formal berfungsi dalam menangani masalah yang meresahkan masyarakat serta agar mencakup tujuan dari pendidikan maka dari itu PKBM dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki dimana melibatkan proses evaluasi dan akreditasi sebagaimana standar penilaian kualitas pendidikan (Febrianti et al., 2020; Putera et al., 2022). Lembaga pendidikan non formal banyak kesamaannya dengan pendidikan formal yang dimana melakukan akreditasi, akreditasi sendiri adalah sebuah upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas sebuah lembaga oleh pemerintah.

PKBM atau lembaga non formal bisa melakukan akreditasi yang mana dinaungi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PNF dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 Tahun 2012 tentang BAN PNF dan Peraturan Pemerintah (PP RI) No. 13 Tahun 2015, yang merupakan revisi kedua atas PP RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Proses akreditasi yang dilakukan untuk memberikan konsensi atas kelayakan di lembaga pendidikan baik PKBM negeri maupun swasta (Koesoemahardja et al., 2016; Liana et al., 2023). Akreditasi menetapkan kelayakan dan kinerja lembaga/program sebagai bentuk tanggung jawab dipublik dimana lembaga mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk ditingkatkan, dalam implementasinya setiap PKBM tentu mengalami kendala baik di internal maupun eksternal seperti kurangnya pemahaman dalam menyiapkan dokumen, proses pengajuan/penilaian seringkali mendadak tanpa adanya koordinasi, dan ketidakrelevan antara praktik saat ini dengan standar akreditasi yang menjadi kendala utama hal ini bisa mempengaruhi kesiapan PKBM dalam penilaian akreditasi (Arsyad, 2023; Dewi et al., 2024; Halimatussa'diah et al., 2022).

Selain itu, akreditasi memberikan kewenangan kepada madrasah dan sekolah untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pedoman akreditasi ini, yang didasarkan pada konsep yang tidak memihak, menyeluruh, adil, transparan, akuntabel, dan profesional, dibuat sebagai upaya untuk menjamin terlaksananya proses akreditasi yang baik (Iskamto et al., 2022; Karsiwan, 2022). Keberhasilan dalam akreditasi berfungsi sebagai penguat yang konstan untuk memperbaiki kualitas dan berusaha memberikan layanan terbaik kepada siswa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan standar madrasah dan sekolah.

Hasil akreditasi yang sangat baik akan memberikan keyakinan kepada siswa bahwa mereka menerima pendidikan berkualitas tinggi, dan sertifikat akreditasi berfungsi sebagai bukti bahwa sekolah atau madrasah yang mereka hadiri memiliki kualitas yang tinggi. Keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2002 oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.087/U/2012 menunjukkan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan standar pendidikan yang sejalan dengan gerakan pendidikan universal yang menuntut pendidikan berkualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Keputusan yang berkaitan dengan standar akreditasi baru untuk sekolah-sekolah dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2002.

Sebelum itu, undang-undang tersebut hanya berlaku untuk lembaga-lembaga swasta, namun mulai saat ini sekolah negeri juga diwajibkan untuk diakreditasi. Pemerintah berupaya dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia termasuk unit-unit pembelajaran yang memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), sehingga pemerintah federal atau daerah mempersiapkan akreditasi secara berlanjut dalam upaya meningkatkan standar kualitas pendidikan, proses akreditasi tersebut wajib dilaksanakan PKBM untuk menjadi syarat dalam melaksanakan program yang akan dijalankan sehingga dapat memenuhi mutu satuan (Masturoh & Ifadah, 2023; Nasution, 2020). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 mendelegasikan sebagai penyelenggara program pendidikan non formal dilaksanakan secara konsisten dalam menjalin mutu programnya maka dari itu akreditasi menjadi instrumen utama untuk menjamin mutu satuan pendidikan non formal.

BAN PAUD dan PNF mewujudkan proses penilaian akreditasi melalui kebijakan penilaian akreditasi berbasis SISPENA yang mengutamakan kinerja sebagai pelengkap paradigma kebutuhan, penilaian kerja merupakan bentuk dari penilaian alternatif dalam mengukur kinerja satuan pendidikan yang didasari pedoman penilaian untuk mendapatkan hasil yang adil, penilaian melalui SISPENA menjadi inovasi baru dalam menilai akreditasi mutu satuan pendidikan melewati beberapa tahap penilaian yang sistematis dan ketat, berawal dari satuan melaksanakan evaluasi yang mengacu pada instrumen instrumen penilaian prasyarat akreditasi selanjutnya melakukan penilaian klarifikasi penilaian akreditasi untuk mengukur kelayakan satuan, sistem SISPENA dilakukan secara bertahap sebagai perwujudan dalam menghasilkan rekomendasi akreditasi yang responsibilitas dan sesuai mutu satuan seperti diamanatkan untuk menjaga dan mengendalikan mutu satuan.

## METODE

Dalam proses mempersiapkan satuan Pendidikan Non Formal PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk akreditasi melalui sosialisasi di Kota Serang semua pihak sangat peduli dengan diadakannya kegiatan sosialisasi akreditasi ini, khususnya yang berada di berbagai kecamatan di Kota Serang hal ini akan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang merupakan landasan bagi pengakuan lembaga atau satuan pendidikan di masyarakat ketika telah menerima akreditasi. Untuk memastikan bahwa hasil akreditasi sesuai dengan harapan setiap satuan pendidikan, kegiatan sosialisasi dan dukungan akreditasi BAN PNF menjadi sangat penting hal ini karena

sispena di satuan PKBM menjadi dasar penilaian status akreditasi satuan Pendidikan Non Formal.

Selama kegiatan sosialisasi dan pendampingan akreditasi BAN PNF di unit-unit PKBM Generus Nusantara di Kota Serang, kami berfokus pada pengarahan pentingnya status akreditasi bagi satuan PNF kepada seluruh pengelola PKBM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan satuan pendidikan dalam menavigasi proses akreditasi, yang nantinya akan memberikan manfaat substansial bagi masyarakat. Pertama, kami menyediakan informasi detail mengenai dasar-dasar proses akreditasi, yang esensial untuk memastikan semua pengelola memahami langkah-langkah yang diperlukan. Kedua, kami memberikan bimbingan praktis tentang cara menyiapkan bukti fisik atau lisensi yang diperlukan untuk sertifikasi. Selanjutnya, peserta diajarkan cara menggunakan aplikasi Sispena untuk membuat dan mengelola dokumentasi akreditasi yang efektif. Terakhir, kami membantu mereka dalam mengidentifikasi dan mengikuti instruksi dapodik yang relevan, serta menyelesaikan sinkronisasi dokumen di Sispena dengan Dapodik sesuai standar yang ditetapkan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada lokasi dan waktu sebagai berikut: Kegiatan pengabdian di masyarakat ini dilakukan di Rumah Bapak Awwaludin selaku Ketua Yayasan. Berlokasi di Lingkungan Butimanik rt.001 rw.007 Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten. Kegiatan sosialisasi persiapan akreditasi ini dilaksanakan secara offline pada hari Selasa, 4 Juni 2024. Strategi pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) Menyusun *PowerPoint* sesuai dengan delapan Standar Nasional BAN PNF dan menyampaikan informasi mengenai kebijakan BAN PNF dan Akreditasi PNF tahun 2024 untuk aplikasi sispena. (2) Kegiatan ini menggunakan metode latihan dan praktek, ceramah, dan tanya jawab. Peserta kegiatan ini adalah pengelola, penilik, dan pimpinan satuan PNF.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tahapan Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan akreditasi BAN PNF di PKBM Generus Nusantara di Kota Serang

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan akreditasi BAN PNF di PKBM Generus Nusantara di Kota Serang diawali dengan tahap pendahuluan, di mana persiapan intensif menjadi kunci utama. Tahap ini meliputi pembuatan surat izin kerjasama dengan pihak terkait, penyusunan materi sosialisasi yang akan disajikan, serta pengaturan lokasi sosialisasi yang kondusif untuk kegiatan tersebut. Setelah semua persiapan selesai, kegiatan berlanjut ke tahap sosialisasi dan audiensi. Pada tahap ini, materi yang dibahas meliputi delapan standar dokumen yang harus dipersiapkan untuk proses akreditasi. Selain itu, tahap ini juga menyertakan sesi diskusi yang melibatkan para pengurus PKBM Generus Nusantara dan para Penilik PKBM Kota Serang. Diskusi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang persyaratan dan prosedur akreditasi, serta menjawab pertanyaan dan mengatasi kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh para pengurus terkait proses akreditasi.

Proses sosialisasi dan pendampingan akreditasi BAN PNF di PKBM Generus Nusantara di Kota Serang menunjukkan sebuah pendekatan yang terstruktur dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan non-formal. Tahap pendahuluan yang

dijalankan dengan persiapan intensif menandakan pentingnya perencanaan yang matang sebelum memasuki fase eksekusi. Pembuatan surat izin kerjasama menunjukkan komitmen formal dan kerjasama antar lembaga yang terlibat, yang esensial dalam melancarkan proses akreditasi. Penyusunan materi sosialisasi yang efektif serta pengaturan lokasi yang kondusif juga mencerminkan upaya serius dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua pihak.

Gambar 1. Penyampaian Materi Terkait Persiapan Akreditasi



Sumber: Dokumentasi TIM, 2024

Gambar 2. Diskusi Terkait Kendala Selama Proses Akreditasi



Sumber: Dokumentasi TIM, 2024

Tahap sosialisasi dan audiensi yang melibatkan diskusi mendalam tentang delapan standar dokumen akreditasi memperlihatkan fokus pada detail teknis yang diperlukan untuk suksesnya akreditasi. Interaksi ini bukan hanya sebagai transfer informasi tetapi juga sebagai forum untuk dialog dua arah, di mana pengurus PKBM dan penilik bisa secara aktif berpartisipasi dalam diskusi. Hal ini sangat kritical karena melibatkan mereka dalam proses pemahaman dan penerapan standar akreditasi secara praktis.

Selain itu, adanya sesi diskusi untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi kekhawatiran mengungkapkan suatu pendekatan yang inklusif dan transparan. Proses ini membantu dalam membangun kepercayaan dan menyamakan persepsi antara semua pihak yang terlibat, yang penting untuk menciptakan keterlibatan yang berkelanjutan dan mendalam. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi potensi hambatan atau masalah yang mungkin timbul selama proses akreditasi, sehingga dapat ditangani sejak dini dengan solusi yang tepat. Dari analisa ini, jelas bahwa pendekatan yang diambil oleh PKBM Generus Nusantara dan para stakeholder terkait menggambarkan suatu model implementasi yang bisa dijadikan contoh dalam pengelolaan dan penjaminan kualitas pendidikan non-formal. Langkah-langkah yang telah diambil ini tidak hanya memperkuat proses akreditasi tapi juga menumbuhkan kapasitas organisasi dan individu yang terlibat dalam jangka panjang.

## 2. Strategi dan Kebutuhan untuk Standar Akreditasi

Di PKBM Generus Nusantara dukungan akreditasi memberikan hasil yang layak dicatat di beberapa bidang, termasuk kurikulum, efektivitas guru, fasilitas, dan kinerja siswa. Meskipun ada beberapa kendala, langkah-langkah yang dilakukan mampu menghasilkan perbaikan, melalui pencapaian ini memberikan PKBM sebuah platform yang kuat untuk mencapai dan mempertahankan akreditasi di masa depan dan memberikan kontribusi jangka panjang dan berkelanjutan bagi akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Perubahan yang dipicu oleh proses pendampingan akreditasi telah menunjukkan bahwa, dengan struktur dan pendampingan yang tepat, PKBM dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang mereka tawarkan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan secara signifikan memajukan pengembangan sumber daya manusia.

Kurikulum PKBM harus dimodifikasi agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan industri dengan lebih baik, demikian ditunjukkan oleh bantuan akreditasi. Penciptaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), khususnya, bersama dengan revisi kurikulum lainnya, menawarkan kepada para siswa sebuah landasan yang kuat untuk membangun keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri. Sejumlah kendala ditemukan selama proses pendampingan termasuk keengganan para pendidik untuk beradaptasi dan terbatasnya dana yang tersedia untuk fasilitas baru. Solusi yang bisa dilakukan adalah kemitraan dengan organisasi lain untuk memberikan dukungan materi dan keuangan, serta strategi pelatihan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Misalnya, bekerja sama dengan perusahaan dan kelompok non-pemerintah untuk menyumbangkan sumber daya pendidikan dan meningkatkan fasilitas.

Terdapat tiga tahap penting dalam melaksanakan sosialisasi akreditasi berjalan dengan lancar yaitu; sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang digunakan untuk mengkategorikan rencana pengabdian masyarakat yang mengajarkan nilai akreditasi (Hasan et al., 2021). Pengelola satuan pendidikan diberikan kegiatan sosialisasi ini untuk membantu mereka mendapatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan tentang kebijakan akreditasi BAN PNF untuk sekolah non formal. Setelah didirikan pada tahun 2014, PKBM Generus Nusantara belum akan memperbarui status akreditasinya hingga tahun 2024. Kegiatan untuk sosialisasi diadakan dan dibuat dengan tujuan untuk

meningkatkan dan memberikan pemahaman kepada lembaga tentang pentingnya melakukan akreditasi. Sosialisasi adalah proses pemberian informasi kepada masyarakat, pengetahuan maupun keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk menangani masalah yang muncul di lingkungan mereka (Hasan et al., 2021).

Sosialisasi juga menurut penulis adalah suatu proses kegiatan pemberian sebuah materi kepada orang lain dan dikemas secara terstruktur dan terencana. Materi yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi ini tentang bagaimana langkah – langkah dalam proses akreditasi lembaga pendidikan nonformal, khususnya BAN PNF dan pemberian contoh persyaratan dokumen delapan standar pendidikan nonformal, diberikan kepada para pengurus dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Memastikan kualitas penyedia pendidikan dan keberhasilan pelaksanaan proses akreditasi bergantung pada substansi materi dari delapan standar pendidikan nasional. Adapun beberapa langkah langkah dalam kegiatan sosialisasi ini dimulai dengan pengajuan permohonan izin kepada lembaga PKBM Generus Nusantara, kemudian dilanjutkan dengan proses wawancara terkait dengan apa saja persiapan yang dibutuhkan oleh PKBM Generus Nusantara ini, lalu dilanjutkan dengan membuat materi yang akan dibutuhkan dalam proses sosialisasi akreditasi.

Pada tahap proses sosialisasi kami memaparkan terkait apa saja dokumen yang harus disiapkan dalam melakukan akreditasi dan diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman bersama di antara semua pengelola di PKBM Generus Nusantara mengenai kebutuhan dokumen yang di butuhkan dalam proses akreditasi. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian adalah delapan komponen utama standar nasional pendidikan.

Tabel 1. Cek Penilaian Prasyarat Akreditasi

No	Standar	Butir Instrument
1	Standar Kompetensi Lulusan	Kompetensi lulusan, Profil lulusan
2	Standar Isi	Muatan materi, Kalender pendidikan
3	Standar Proses	Silabus PPM, RPP/RPPM, Pengawasan pembelajaran
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dokumen jumlah dan kualifikasi akademik (PTK), Dokumen pengalaman pekerjaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)
5	Standar Sarana dan Prasarana	Ketersediaan peralatan pembelajaran, Penggunaan media pembelajaran, Prasarana ruangan, Kepemilikan prasarana
6	Standar Pengelolaan	Dokumen profil pimpinan/kepala, Diklat/kursus manajerial yang pernah diikuti oleh pimpinan/kepala, Visi, misi, dan tujuan, Kemitraan, Pelaksanaan

No	Standar	Butir Instrument
7	Standar Pembiayaan	Ketelitian dokumen penerimaan dan pengeluaran biaya, sesuai dengan prinsip akuntansi, Keuangan
8	Standar Penilaian	Dokumen panduan/pedoman penilaian, Pelaksanaan penilaian, Data peserta didik yang terdaftar dan selesai mengikuti pembelajaran

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Lembaga PKBM Generus Nusantara diwajibkan untuk mempersiapkan dokumentasi akreditasi untuk aplikasi Sispena sesuai dengan kriteria kompetensi lulusan. Kriteria kompetensi lulusan selanjutnya disempurnakan dan diperkuat dengan tujuan PKBM Generus Nusantara, selain mengacu pada pencapaian standar pendidikan nasional. Setelah itu, dokumen yang telah disiapkan harus disimpan dalam database yang telah disiapkan oleh lembaga akreditasi. Lembaga PKBM Generus Nusantara diwajibkan mempersiapkan standar Isi untuk dipersiapkan dokumentasi akreditasi di aplikasi Sispena. Dasar data akreditasi institusi merupakan tempat penyimpanan dokumen standar isi yang telah disiapkan setelah dibuat.

Pada standar proses lembaga PKBM Generus Nusantara harus mempersiapkan dokumen akreditasi untuk aplikasi Sispena sebagai bagian dari prosedur standar BAN PNF. Selain untuk memenuhi pencapaian standar BAN PNF dokumen standar proses yang diterapkan diperkuat dan disempurnakan dengan lingkungan belajar yang dibangun di PKBM Generus Nusantara. Lembaga PKBM Generus Nusantara diharapkan menyiapkan dokumentasi akreditasi di aplikasi Sispena sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan nasional, tetapi juga diperluas dan dinilai sesuai dengan kredensial, evaluasi, dan sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki oleh PKBM Generus Nusantara.

Untuk mengajukan permohonan sispena, PKBM Generus Nusantara harus menyiapkan dokumentasi akreditasi berdasarkan standar Sarana dan Prasarana. Dokumen standar sarana dan prasarana diperkuat dan dilengkapi dengan gambar sarana dan prasarana yang tersedia di PKBM Generus Nusantara, selain itu juga mengacu pada kelengkapan kebutuhan pendidikan nasional. Lembaga PKBM Generus Nusantara harus menyiapkan dokumen atau borang akreditasi pada aplikasi sispena sesuai dengan standar pengelolaan.

Selain membahas pencapaian standar pengelolaan, dokumen standar pengelolaan ditingkatkan dan diperkuat oleh tata kelola dan proses pendidikan yang ditetapkan oleh PKBM Generus Nusantara. Lembaga-lembaga PKBM Generus Nusantara diwajibkan di bawah persyaratan keuangan untuk menyiapkan dokumentasi akreditasi untuk aplikasi sispena, setelah disiapkan dokumen standar pendanaan disimpan dalam database akreditasi lembaga. Pada standar penilaian lembaga PKBM Generus Nusantara diwajibkan untuk menyiapkan dokumentasi akreditasi untuk aplikasi Sispena. Selanjutnya, dokumen yang telah disiapkan untuk standar evaluasi pendidikan disimpan dalam data base akreditasi yang telah dibuat oleh lembaga.



3. Instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) PKBM Generus Nusantara  
Dari dokumen berdasarkan survei membutuhkan penyesuaian dengan dokumen atau data-data internal dari PKBM untuk disesuaikan kembali dengan template yang peneliti pada setiap butir standarnya. Menurut temuan survei yang dilakukan oleh para peneliti di PKBM Generus Nusantara dan hasil keterangan dari pihak PKBM Generus Nusantara terdapat beberapa dokumen yang masih dalam proses dilengkapi maka dari itu peneliti mendampingi untuk membantu melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk akreditasi. Berikut dokumen yang masih dalam proses sesuai dengan pedoman:

Tabel 1. Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA)

No	Standar	Butir instrumen	Hasil
1	Standar kompetensi lulus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi lulusan</li> <li>• Profil lulusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhi</li> <li>• Terpenuhi</li> </ul>
2	Standar isi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muatan kurikulum</li> <li>• Kalender pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terpenuhi</li> <li>• Belum terpenuhi</li> </ul>
3	Standar proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silabus\RPPM</li> <li>• RPP\RPPM</li> <li>• Pengawasan pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhi</li> <li>• Belum terpenuhi</li> <li>• Terpenuhi</li> </ul>
4	Standar pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen jumlah dan kualifikasi akademik pendidikan (PTK)</li> <li>• Dokumen pengalaman pekerjaan pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK)</li> <li>• Dokumen jumlah dan kualifikasi akademik pendidik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhi</li> <li>• Terpenuhi</li> <li>• Terpenuhi</li> </ul>
5	Standar sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan peralatan pembelajaran</li> <li>• Penggunaan media pembelajaran</li> <li>• Prasarana ruangan</li> <li>• Kepemilikan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhi</li> <li>• Terpenuhi</li> <li>• Terpenuhi</li> <li>• Terpenuhi</li> </ul>
6	Standar pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen profil pimpinan/ketua</li> <li>• Diklat/Kursus Manajerial yang Pernah diikuti oleh Pimpinan/Ketua PKBM atau Satuan PNF Sejenis</li> <li>• Visi, Misi, dan Tujuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhi</li> <li>• Terpenuhi</li> <li>• Terpenuhi</li> </ul>

Sumber: Kemendikbud, 2024.

Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) untuk PKBM Generus Nusantara menunjukkan tingkat kepatuhan yang variatif terhadap standar yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Dari enam standar yang dievaluasi, empat di antaranya—Standar Kompetensi Lulus, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana—telah terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan

bahwa PKBM Generus Nusantara telah berhasil mengimplementasikan sebagian besar prasyarat yang diperlukan untuk akreditasi. Namun, masih ada kekurangan dalam Standar Isi dan sebagian dari Standar Proses, di mana semua butir instrumen dalam kedua kategori tersebut belum terpenuhi, menunjukkan adanya kebutuhan untuk pengembangan kurikulum dan kalender pendidikan yang lebih matang serta peningkatan dalam perencanaan dan pengawasan pembelajaran.

Pada aspek Standar Isi, terdapat kekurangan dalam muatan kurikulum dan kalender pendidikan yang belum memenuhi kriteria yang ditentukan. Ini mengindikasikan perlunya revisi dan penyesuaian lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan standar akademik yang diharapkan. Sementara itu, dalam Standar Proses, walaupun Silabus dan Pengawasan Pembelajaran telah memenuhi standar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) masih memerlukan penyempurnaan. Hal ini menunjukkan bahwa PKBM perlu lebih fokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran yang secara langsung akan berdampak pada kualitas lulusan.

Lebih lanjut, berdasarkan temuan survei, terdapat beberapa dokumen penting yang masih dalam proses dilengkapi, yang menunjukkan komitmen PKBM untuk terus memperbaiki dan memenuhi semua prasyarat akreditasi. Peneliti telah mendampingi PKBM dalam melengkapi dokumen-dokumen ini, yang menandai langkah proaktif PKBM dalam memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Penyesuaian dokumen dengan data internal PKBM juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa semua informasi yang disajikan akurat dan sesuai dengan template yang telah ditetapkan oleh para peneliti. Proses ini tidak hanya penting untuk keberhasilan akreditasi tetapi juga untuk jaminan kualitas pendidikan yang diberikan kepada para siswa.

## KESIMPULAN

Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lainnya digunakan dalam tinjauan penjaminan mutu, yang merupakan upaya sistemik yang dilakukan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan IQ peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti merumuskan strategi dalam meningkatkan akreditasi PKBM Generus Nusantara diperoleh dengan pendekatan seperti meningkatkan pengalaman pendidik dan kualifikasi yang dimiliki pendidik, meningkatkan kompetensi pendidik dan kesesuaian pendidik dengan bahan ajar dan meningkatkan metode pembelajaran, diharapkan dengan menerapkan strategi tersebut PKBM Generus Nusantara akan meningkat pada evaluasi akreditasi yang akan datang dan semakin baik meskipun dalam jalur pendidikan non-formal, sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Secara keseluruhan, dukungan akreditasi hasil yang diperoleh PKBM Generus Nusantara cukup memuaskan, dan menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan akreditasi lebih lanjut. Pencapaian ini menunjukkan komitmen PKBM untuk menawarkan pendidikan yang tepat waktu, inklusif, dan berkualitas tinggi kepada masyarakat. PKBM memiliki potensi untuk berkontribusi lebih banyak dalam

pengembangan sumber daya manusia baik secara lokal maupun nasional dengan mempertahankan dan meningkatkan standar yang telah dicapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Ovilailia, E., Andani, I. S., Nirkana, M. A., Rahayu, S. L., Ishaq, M., & Purwito, L. (2022). Standar Pengelolaan Program Pendidikan Nonformal Dari Perspektif Akreditasi. *Jurnal Sustainable*, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.32923/KJMP.V5I1.2403>
- Arsyad, I. (2023). Implementasi Akreditasi Pada Satuan Pkbn (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Di Kecamatan Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 329–332. <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/ls/article/view/3423>
- Dewi, K. H. S., Melati, I. G. A. S., Putera, W. A., Saskara, I. M. R., Ermawati, D., & Mahaputra, I. K. A. D. (2024). PKM Digitalisasi Bahan Ajar Bagi Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(2), 541–552. <https://doi.org/10.53769/JAI.V4I2.751>
- Febrianti, R., Wadin, W., & Pradikto, B. (2020). Analisis Kesiapan PKBM dalam Menghadapi Akreditasi Berbasis Sispna 2.0 di Kabupaten Rejang Lebong. *Journal Of Lifelong Learning*, 3(2), 88–99. <https://doi.org/10.33369/JOLL.3.2.88-99>
- Halimatussa'diah, O., Sulistiono, H., & Avrizar, R. (2022). Sistem Informasi Presensi Siswa Dan Guru PKBM Paket B Tahfiz Daarus Sunnah Cibinong. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(12), 3279–3288. <https://doi.org/10.53625/JABDI.V1I12.2051>
- Hasan, F., Fajarwati, L., & Imamyartha, D. (2021). Peningkatan Partisipasi Akreditasi Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Delapan Standar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 27(2), 170–174. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/23726>
- Iskamto, D., Gultom, E., Liyas, J. N., Ansori, P. B., Harwina, Y., & Hendra, T. (2022). Pelaksanaan Proses Akreditasi Sekolah untuk menjaga kualitas Pendidikan Sekolah/Madrasah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(2), 46–51. <https://doi.org/10.54099/JPMA.V1I2.132>
- Karsiwan, K. (2022). Sosialisasi Sistem Akreditasi dan Keterbutuhan Dokumen Akreditasi Pada PKPPS Khidmatusunah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 2(2), 96–109. <https://doi.org/10.31004/ABDIRA.V2I2.140>
- Koesoemahardja, N. F., Suparwati, A., & Arso, S. P. (2016). Analisis Kesiapan Akreditasi Dasar Puskesmas Mangkang Di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(4), 94–103. <https://doi.org/10.14710/JKM.V4I4.13946>
- Liana, H., Fajriani, K., Aslina, Y., & Sjamsir, H. (2023). Sosialisasi dan Lokakarya Akreditasi Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF di Kecamatan Penajam Kabupaten Paser Utara Kalimantan Timur. *TAAWUN*, 3(02), 272–282. <https://doi.org/10.37850/TAAWUN.V3I02.646>
- Masturoh, U., & Ifadah, A. S. (2023). Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF Serta Pendampingan Pengisian Sispna 3.1 Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kabupaten Gresik. *Journal of Early Childhood and Character Education*, 3(2), 133–152. <https://doi.org/10.21580/JOECCE.V3I2.17687>



- Nasution, R. H. S. (2020). Implementasi akreditasi satuan PAUD di Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan. UIN Sumatera Utara.
- Nugroho, A. (2021). Pengelolaan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Menjahit Di PKBM Assolahiyah Karawang. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 4(2), 46–56. <https://doi.org/10.22460/COMM-EDU.V4I2.6995>
- Putera, H. R., Ats-Tsauri, M. I., & Ropandi, Y. (2022). Strategi Peningkatan Akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Pendekatan Interpretive Structural Modeling (ISM). *Jurnal Teknik Industri*, 3(02), 39–48. <https://doi.org/10.37366/JUTIN0302.3948>
- Sukmana, C., Lutfiansyah, D. Y., Purnomo, P., & Sulistiono, E. (2023). Perencanaan pendampingan mutu lembaga PKBM di Kota Cimahi. *Abdimas Siliwangi*, 6(3), 661–674. <https://doi.org/10.22460/AS.V6I3.17679>